



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI,
KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR,
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,
PT.BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk KANTOR CABANG DENPASAR
BPJS KESEHATAN CABANG DENPASAR,
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR,
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI AREA BALI SELATAN,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 415.4/02/KB/BKS/2018
NOMOR : KB-01/WPJ.17/2018
NOMOR : W.20.UM.03.03.578
NOMOR : B/767/II/HUK 8.1/2018/Polresta Dps
NOMOR : 345/2-51.71/II/2018
NOMOR : 0280/SPK/DIR/DPS/2018
NOMOR : B.1174 KC-XI/RTL/2/2018
NOMOR : 23/KTR/XI-01/0218
NOMOR : PER/06/012018
NOMOR : 0003.PJ/STH.00.03/ABS/2018
NOMOR : PDAM.04/PRJ/II/2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
DENPASAR**

Pada hari ini, senin tanggal dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :



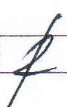


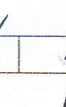





1. IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA : Walikota Denpasar, dalam hal ini dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-761 Tahun 2016 Tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Denpasar Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. GORO EKANTO

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 628/KMK.01/UP.11/2017 tanggal 18 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Renon Denpasar.

3. MARYOTO SUMADI MS.,S.H.,M.M : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

										
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.


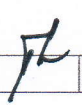
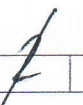
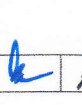
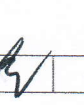
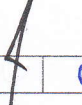
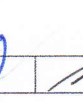
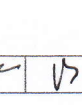
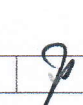

**4. KOMISARIS BESAR POLISI
HADI PURNOMO, S.H. M.H.**

: Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/614/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, beralamat di Jalan Gunung Sanghyang no. 110 Denpasar.

5. I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H.

: Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 439/KEP-2.3.8/XI/2017, Tanggal 14 Nopember 2017, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Denpasar, berkedudukan di

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

**6. Drs. I KETUT NURCAHYA, M.M.
dan I GDE SUDIBIA, S.H.**


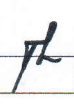
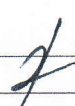

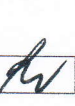



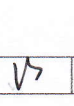

Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar.

: Pelaksana Tugas Sementara
Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Bali, bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili
Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Bali, berdasarkan Akta
Nomor 54 tanggal 24 Nopember
2017 tentang Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar
Biasa yang dibuat oleh I Made
Widiada, Sarjana Hukum, Notaris
di Denpasar, bertindak untuk
dan atas nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali,
berkedudukan di Jalan Raya
Puputan, Niti Mandala Renon,
Denpasar.

7. I KETUT MANUARTHA

: Pemimpin Cabang Bank Rakyat
Indonesia, Persero Tbk Kantor
Cabang Denpasar Gajah Mada
berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : B.948/KC-
XI/RTL/02/2018 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Bank Rakyat Indonesia, Persero
Tbk Cabang Denpasar Gajah
Mada, dalam jabatannya
berkedudukan di Jalan Gajah
Mada Nomor 5-7, Denpasar.

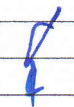


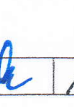
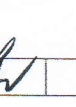





PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

8.dr.KIKI CHRISTMAR MARBUN,AAK. : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 7389/Peg-04/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Mutasi Pegawai atas nama Kiki Christmar Marbun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No. 6 Renon, Denpasar.

9. NOVIAS DEWO SANTOSO : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bali Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : KEP/22/092016 Tentang Mutasi, Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang sah dan berwenang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 143 Denpasar .

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

10. I MADE SUAMBA

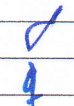










: Manajer PT PLN (Persero)
Distribusi Bali Area Bali Selatan
berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Nomor :
1519.K/SDM.00.03/DIR/2017
tanggal 31 Juli 2013 dalam hal
ini bertindak untuk dan atas
nama PT PLN (Persero) Distribusi
Bali Area Bali Selatan sesuai
surat kuasa nomor :
008.SKU/SDM.08.01/DIST.BALI/
2017 tanggal 28 Agustus 2017,
berkedudukan di Jalan Sudirman
No. 2 Denpasar.

11. IDA BAGUS GEDE ARSANA, S.T.

: Direktur Utama Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Denpasar
berdasarkan Surat Keputusan
Walikota Denpasar Nomor :
188.45/1200/Hk/2015 tanggal
11 Desember 2015 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Denpasar dalam jabatannya
berkedudukan di Jalan A. Yani
Nomor 98 Denpasar.

Selanjutnya Nomor 2 sampai
dengan Nomor 11 disebut **PIHAK
KEDUA**

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

										
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

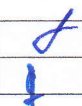

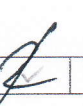
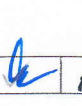
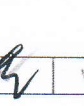

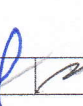
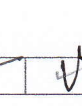
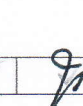

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kota Denpasar, yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 JO.PMNA 39 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

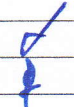









PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

- PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma;
25. Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir, Akta Nomor 14 tanggal 11 Janurai 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjanan Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0017367 tanggal 16 Januari 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk :


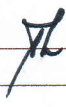

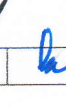

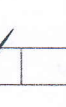

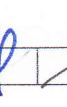
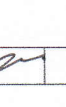
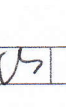

1. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik;
3. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar;
4. Meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas;
5. Memberikan kemudahan berusaha bagi investor dalam dan luar negeri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Layanan Publik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
2. Penyediaan dan Pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
3. Peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai Standar Pelayanan yang berlaku;
4. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
5. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi, dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

										
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Apabila Pelaksanaan Kesepakatan Bersama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan / atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

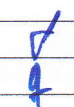



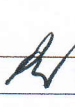

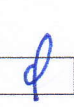
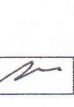
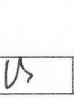

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 11 (sebelas) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

MANTRA, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL

TGL 20

KEPALA KAWIL-DUP

E953DAEF701910632

6000

ENAM RIBU RUPIAH

KEP. JENDERAL PIJAK

GORO EKANTO

MARYOTO SUMADI MS.,S.H.,M.M



KOMISARIS BESAR POLISI
HADI PURNOMO, S.H. M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI
HADI PURNOMO, S.H. M.H.

I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H.

Drs. I KETUT NURCAHYA, M.M.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

g r e h f p m u p

